

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru tahun 2019 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian merupakan wujud nyata dari pelaksanaan rencana pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu kepada RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan RKPD Kota Pekanbaru. Diharapkan nantinya LKjIP 2019 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 ini.

Pekanbaru, Januari 2020

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Statistik dan Persandian

FIRMANSYAH EKA PUTRA, ST, MT
Pembina Tk. I/ IV a
NIP. 19720131 200605 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang 3

I.2 Landasan Hukum 5

I.3 Maksud dan Tujuan.....6

I.4 Gambaran Umum Organisasi 6

1.5 Susunan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru……..…..16

1.6 Sistematika Penulisan.....17

Bab II Perencanaan Kinerja

II.1 Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2019 18

II.1.1 Visi.....18

II.1.2 Misi 19

II.1.3 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan.....21

II.1.4 Indikator Kinerja Utama 23

II.2 Penetapan Kinerja 25

Bab III Akuntabilitas Kinerja

III.1 Capaian Kinerja 29

III.2 Realisasi Keuangan 38

Bab IV Penutup 43

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dengan dilaksanakan Otonomi daerah berdasarakan undang-undang Nomor32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008, dimana Kabupaten dan Kota memiliki Otonomi yang luas dan disesuaikan kebutuhan daerah itu sendiri. Dengan demikian akan terjadi pemekaran urusan otonomi daerahyang selama ini dilaksankan oleh Kantor/Departemen/Instasi vertikal di daerah. Semangat otonomi daerah telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *GOOD GOVERNANCE,* selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan NepotIsme (KKN). Sehinggatercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *Public Good and Service* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 landasan utama yaitu: Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas pokok maka perlu menyusun laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama tahun 2019 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam rencana Kerja Tahun 2019, sehingga LKjIP merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai tolak ukur dalam rangkameningkatkan kinerja pelayaanan bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat.

Dalam Rangka mewujudkan hal tersebut maka pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tetang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah, Selanjutnya sebagai tindak lanjut Instruksi presiden tersebut, Kepala lembaga Administrasi Negara (LAN) menetapkan pedoman penyusunan pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakekatnya merupakan sinergi dari akuntabilitas manajerial, akuntabilitas proses dan akuntabilitas program yang saling mendukung dan saling terkait satu sama lain. Akuntabilitas manajerial menitikberatkan pada efisiensi, efektivitas dan kehematan dalam penggunaan dana harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas proses menitikberatkan pada kebutuhan terhadap peraturan perundang–undangan dalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan untuk pencapaian misi organisasi. Sedangkan akuntabilitas program pada dasarnya memberikan perhatian yang besar pada pencapaian hasil kegiatan instansi pemerintah. Dalam hal ini seluruh aparatur pemerintahan berkemampuan untuk mencapai hasil sesuai dengan misi yang diembannya, bukan hanya sekedar patuh terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur.

Pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah yang beraneka ragam dan kompleks memerlukan dukungan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber–sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang–uundangan dan kebijakan yang berlaku, aman dari tindakan pemborosan, kerugian dan penyalagunaan serta menjamin tersedianya data yang dapat dipercaya (akurat) dan dapat diungkapkan secara memadai dalam suatu laporan secara berkala dan melembaga. Selain itu, perlu pula diungkapkan proses pelaksanaan berbagaikebijakan dan program pembangunan dengan dinamika interaksinya dengan lingkungan.

Dengan demikian, dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, para pejabat dan pegawai yang berwenang diharuskan tidak saja bertamnggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga bertanggung jawab pada peningkatan kompentensi professional dan daya saing memalui berbagai pengebangan kebijakan dan program secara efesien dan efektifatas sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah diperlukan suatu perubahan fokus/orientasi manajemen instansi pemerintah yang semula lebih berfokus pada kegiatan yang terkait dengan keluaran (*output*) menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih dihubungkan dengan hasil (*outcome*) yang diperoleh.

Akuntabilitas kinerja dimaksud harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Di samping itu, harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara yang telah ditetapkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tersebut diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir pada pengkuran kinerja atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaranorganisasi yang telah ditetapkan.

Penyajian laporan Akuntabilitas ini didasarkan peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah. Didalamnya memuat unsur-unsur PerencanaanStrategis dan Evaluasi serta analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas , Informatika, Statistik dan PersandianKota Pekanbaru tahun 2019.

I.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 1tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Walikota Pekanabru nomor 13 tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru;

I.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka mewujudkan administrasi kepegawaian yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempratekkan prinsip-prinsip *Good Governance*, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *Public Good and Service* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai salah satu sarana yang merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Tahun 2019 serta memperkuat peran dan kapasitas institusi parlemen dengan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

I.4 Gambaran Umum Organisasi

Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat daerah yang keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 13 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melalui media, pengembangan aplikasi TIK, statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Perangkat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian dan tugas pembantuan lainnya;
b. perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
c. perumusan dan penetapan rencana umum urusan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
d. perumusan peraturan dan perundang-undangan daerah serta kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
e. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
f. pengkoordinasian dan pengarahan pengelolaan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada dinas.
g. pelaporan pelaksanaan tugas, saran dan pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan evaluasi;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi unsur organisasi:

Kepala Dinas

a. perumusan dan penetapan visi dan misi serta Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
b. perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
c. perumusan dan penetapan rencana umum urusan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
d. perumusan peraturan dan perundang-undangan daerah serta kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
e. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
f. pengkoordinasian dan pengarahan pengelolaan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada dinas.
g. perencanaan dan pengembangan serta pembinaan pegawai.

h. pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
i. pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
j. pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
k. pelaporan pelaksanaan tugas, saran dan pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan evaluasi.
l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sekretariat berfungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
b. Perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi;
c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
d. Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
f. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
g. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas dua sub bagian, yaitu **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan dan Program**. Sub bagian umum memiliki tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja **Sub Bagian Umum** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
c. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
d. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
e. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
f. pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
g. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
h. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
i. pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
j. perumusan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan Dinas.
k. pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan Dinas.
l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi

a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Laporan Realisasi Fisik Program Pembangunan, Laporan Tahunan dan Laporan Evaluasi Kinerja.
c. perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
d. perumusan, pelaksanaan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
e. pelaksanaan fasilitasi dan menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
f. pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
g. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
h. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan.
i. pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
j. pelaksanaan dan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan dinas.
k. penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
l. penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi, kemitraan informasi masyarakat dan pengembangan multi media.
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi, kemitraan informasi masyarakat dan pengembangan multi media.

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi, kemitraan informasi masyarakat dan pengembangan multi media.
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi, kemitraan informasi masyarakat dan pengembangan multi media.
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi, kemitraan informasi masyarakat dan pengembangan multi media.
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik terdiridari :

a. Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi.
b. Seksi Pengembangan Multi Media.
c. Seksi Kemitraan Informasi Masyarakat.

Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi.
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi.
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi.
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi.
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Multi Media dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan multi media.
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan multi media.
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan multi media.

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan multi media.
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kemitraan Informasi Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan informasi masyarakat untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan informasi masyarakat untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan informasi masyarakat untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan informasi masyarakat untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan layanan Statistik dan Persandian. Untuk melaksanakan tugas Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik dan Persandian.
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Statistik dan Persandian.
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Statistik dan Persandian.
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian.
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari :

a. Seksi Survey dan Akuisisi Data.
b. Seksi Pengolahan dan Analisis Data.
c. Seksi Persandian.

Seksi Survey dan Akuisisi Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survey dan akuisisi data.
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang survey dan akuisisi data.
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survey dan akuisisi data.
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang survey dan akuisisi data.
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengolahan dan Analisis Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan analisis data.
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan dan analisis data.
c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan analisis data.
d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan dan analisis data.
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang persandian.
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian.
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian.
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang persandian.
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Teknologi Informatika mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan e-Government dan teknologi informatika. Untuk melaksanakan tugas Penyelenggaraan e-Government dan Teknologi Informatika mempunyai fungsi

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastuktur dan teknologi informatika, pengembangan aplikasi dan sistem informasi dan tata kelola e-government.
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastuktur dan teknologi informatika, pengembangan aplikasi dan sistem informasi dan tata kelola e-government.
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastuktur dan teknologi informatika, pengembangan aplikasi dan sistem informasi dan tata kelola e-government.
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastuktur dan teknologi informatika, pengembangan aplikasi dan sistem informasi dan tata kelola e-government.
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyelenggaran e-Government dan Teknologi Informatika terdiri dari :

a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika
b. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi
c. Seksi Tata Kelola e-Government

Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

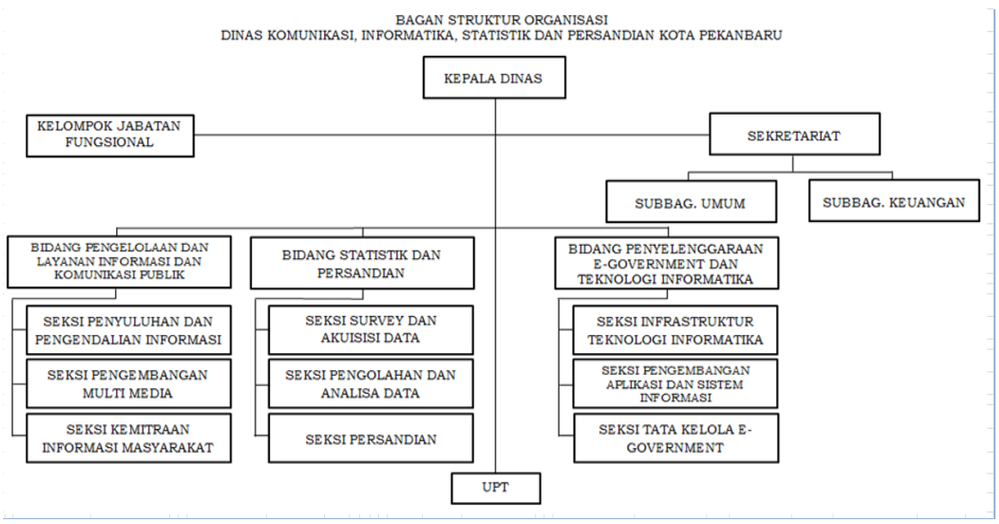
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur teknologi informatika.
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur teknologi informatika.
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur teknologi informatika.
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informatika.
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi dan sistem informasi.
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan aplikasi dan sistem informasi.
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan aplikasi dan sistem informasi.
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi dan sistem informasi.
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Tata Kelola e-Government dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola e-government.
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tata kelola e-government.
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola e-Government.
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola e-government.
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

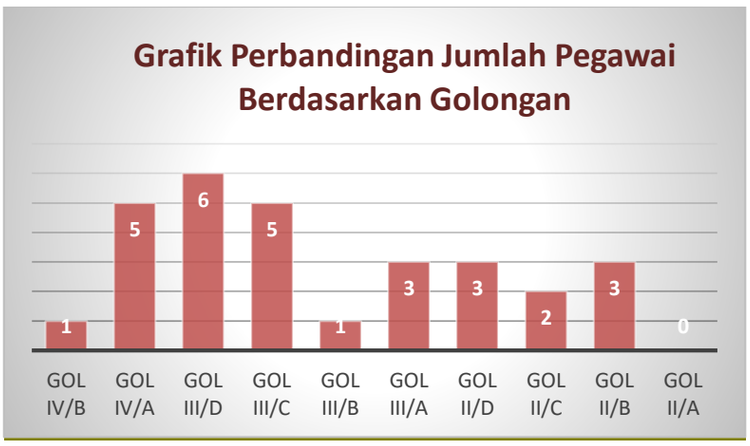


I.5. Susunan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru

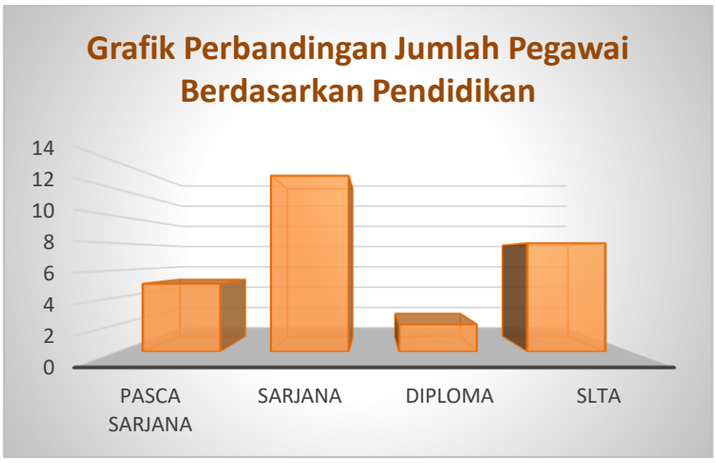
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi nya (tupoksi) pada tahun 2019Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru di dukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 77 orang yang terdiri dari 29 orang pegawai negri sipil (PNS) 48 orang tenaga harian lepas(THL). Sumber daya aparatur yang tersedia dapat dilihat pada kualifikasi pegawaimenurut jenjang kepangkatan/ golongan tahun 2019 dalam tabel di bawah ini.



Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon



Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika LKjIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Tahun 2019, meliputi :

a. Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan
b. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja memuat rencana strategis, rencana kerja tahun 2018, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan indicator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru serta penetapan kinerja
c. Bab III Akuntabilitas Kinerja memuat pengukuran kinerja, analisis kinerja dan analisis keuangan.
d. Bab IV Penutup memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2019

Tantangan birokrasi masa depan meliputi berbagai aspek, baik dalam negeri maupun mancanegara yang bersifat alamiah maupun sosial budaya, sosial politik, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan serta responsible dan accountable. Seiring dengan itu penerapan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan bersih, bebas KKN (*Clean Govemment*) yang juga merupakan pesan agenda reformasi. Kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dapat dicapai melalui proses belajarsecara terus menerus tanpa ada batas akhir, kerena pada dasarnya proses belajar itu merupakan *Long Life Learning* bagi setiap manusia proses belajar bagi aparat pemerintah daerah guna mencapai kualitas dan profesionalisme yang diharapkan dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah.

Dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana pemerintah Kota Pekanbaru dibidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian serta dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat, maka berdasarkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja pemerintah, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru perlu memutuskan Visi dan Misi sebagai satu kesatuan dengan rangkaian kebijakan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2017 sampai tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut visi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru diharapkan mampu memainkan peran yang menetukan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis, sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

II.1.1 Visi

Visi yang dimaksudkan adalah cara pandang jauh ke depan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan sehingga pada gilirannya dengan visiyang tepat, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru akan menjadi akselerasi bagi pelaksanaan tugas dibidang politik sub bidang pembangunan politik dalam negeri dan administrasi publik.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut maka visi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dirumuskan sebagi berikut :

"Terwujudnya Penyelenggaraan E-Government Cerdas Melalui Pemanfaatan Komunikasi Dan Informatika Yang Efektif Dan Efisien Untuk Mendukung Kota Pekanbaru Smartcity Yang Madani"

II.1.2 Misi

Salah satu aspek penting dalam menopang suksesnya pelaksanaan otonomi daerah adalah satu satunya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kerja berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan misinya secara jelas sebagai suatu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian misi dapat terwujud apabila setiap instansi pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Guna mewujudkan misi yang lebih ditetapkan maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru perlu menetapkan misinya secara jelas sebagai suatu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai suatu pernyataan yang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi juga diharapkan maupun membawa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru pada suatu fokus yang mampu memberikan penjelasan tentang keberadaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

Adanya penjelasan pernyataan misi pasda akhirnya diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dengan benar keberadaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, mengetahui secara jelas peran dan programnya beserta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Dengan memperhatikan masukan dari pihak- pihak yang berkepentingan dan menilai lingkungan strategis yang berpengaruh serta menyelaraskan dengan tuntutan peran dan kemampuan sumber daya organisasi yang dimiliki, maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru merumuskan pernyataan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan e-Government dan peningkatan profesionalisme

Pemenuhan infrastruktur jaringan yang terpadu diperlukan sebagai landasan konektifitas bagi komunikasi data layanan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi modern yang berbasis teknologi informasi merupakan faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara cepat dan tepat.

Sistem aplikasi yang terintegrasi merupakan penyatuan berbagai macam aplikasi layanan pemerintahan untuk memudahkan pertukaran data antar instansi pemerintahan sebagai perwujudan layanan *e-government* bagi masyarakat. Peningkatan e-gov dapat terlaksana dengan baik manakala terdukung peningkatan keamanan sistem informasi, peningkatan cakupan infrastruktur jaringan serta mekanisme peneglolaan data yang terintegrasi.

Selain itu perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untukmewujudkan pelayanan prima.

Peningkatan kompetensi SDM tidak hanya bagi pengelola, namun juga kepada pengguna, sehingga pemanfaatan teknologi informasi betul-betul bisa berdampak positif dan saling mengisi.

2. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial, dan kemitraan profesi

Guna mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi dilakukan dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai komunitas lokal, nasional maupun internasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan sarana potensi lokal untuk mendukung program pemerintah dalam layanan komunikasi dan informasi. Pengembangan transparansi komunikasi dan informasi pada komunikasi sosial dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan KIM berbasis IT.

Disamping itu juga dilakukan dengan penguatan kemitraan profesi dengan penguatan jejaring pada mitra profesi dibidang komunikasi dan informasi.Keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu, oleh karena itu untuk sinergitas informasi dan dokumentasi antara pemerintah atau badan publik kepada masyarakat dan antar masyarakat diperlukan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik PPID Kabupaten maupun PPID OPD.

Penyebarluasan informasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui berbagai sarana yang tumbuh berkembang dimasyarakat yaitu pelaksanaan dialog publik, pertunjukan rakyat, baliho, spanduk, leaflet dan sarana penyebarluasan informasi luar ruang lainnya.

II.1.3 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan

a. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru mempunyai tujuan antara lain :

1. Meningkatnya koordinasi, kerjasama, fungsi dan penguatan lembaga komunikasi sosial danlembaga komunikasi pemerintah serta pemberdayaan potensi seni budaya masyarakat dalam mewujudkan informasi yang berkualitas dan pengembangan kelompok informasi masyarakat guna peningkatan kecerdasan masyarakat, optimalisasi penyebarluasan informasi masyarakat melalui berbagai media serta identifikasi, distribusi dan analisa informasi
2. Meningkatnya kesediaan data informasi yang akurat, realiabel, lengkap dan terwujudnya sinergitas data informasi antar OPD. Meningkatnya arus dan kemudahan akses informasi dari, oleh dan kepada masyarakat serta tersedianya pusat data TIK. Terlaksananya identifikasi, analisa dan pengolahan informasi.
3. Meningkatnya kemampuan SDM pengelola dan penguna TIK serta masyarakat, pemantapan tata kelola TIK, pengembangan aplikasi, infrastruktur jaringan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur termasuk penyediaan dokumen, data, informasi serta standarisasi meta data. Meningkatnya keterpaduan penyederhanaan akses dan transparansi layanan informasi secara optimal antar instansi pemerintah, antara pemerintah dengan dunia usaha dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.
4. Meningkatnya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan kepastian pengusahaan, penyelenggaraan TIK.

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dalam bentuk terakhir dan akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu bulanan, semesteran dan tahunan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, sasaran yang ditetapkan dapat

memberikan fokus pada penyusuan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran yang ditetapkan pada dasarnya fokus merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisassi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru mempunyai sasaran strategis yaitu:

1) Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan terbangunnya jejaring publikasi pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha.
2) Meningkatnya bimbingan teknis, koordinasi, penataan, evaluasi dan pendayagunaanlembaga komunikasi sosial, lembaga profesi komunikasi dan informasi.
3) Menguatnya jalinan hubungan lembaga profesi komunikasi dan informasi, pemantau media
4) Meningkatnya kualitas SDM dan penataan kelembagaan komunikasi sosial.
5) Meningkatnyakuantitas, kualitas dan pendayagunaan Kelompok Informasi Masyarakat
6) Meningkatnya pendayagunaan komunitas strategis masyarakat.
7) Terwujudnya pengumpulan data informasi yang terverifikasi baik data dasar maupun meta data yang standart dan terintegrasi
8) Terlaksananya indentifikasi, analisa informasi dan pengolahan data informasi
9) Meningkatnya kemudahan akses data dan informasi dalam berbagai bentuk
10) Terwujudnya sistem penyampaian informasi dari oleh dan kepada masyarakat melalui berbagai media
11) Meningkatnya peran media center, telecenter, web Pemerintah Kota dan OPD serta media informasi pemerintah lainnya
12) Meningkatnya tata kelola TIK, SDM pengelola dan pengguna TIK.
13) Terwujudnya jaringan intra dan infrastruktur TIK yang handal
14) Tersedianya aplikasi e-government yang terintegrasi
15) Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi berbasis TIK.
16) Terwujudnya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan kepastian pengusahaan, penyelenggaraan TIK

II.1.4 Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan RENSTRA Tahun 2017. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2018sebagai berikut :

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatiks Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN RENSTRA 2016	KONDISI I TAHUN 2017	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
							I (2018)	II (2019)	III (2020)	IV (2021)	V (2022)	
1	Mewujudkan Tata Kelola Cerdas	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	IKM OPD Sangat Baik	Nilai IKM	-	-	79,40	80%	85%	90%	95%	100 %
		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai AKIP			C	B	BB	A	A	A
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang terintegrasi dan Transparan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	Persentase Aplikasi yang terintegrasi Antar Instansi dan Lembaga Lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru	%			60%	70%	80%	90%	100%	100%
		Meningkatnya Sistem Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Sistem Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%			35%	55%	70%	83%	90%	100%
		Meningkatnya Layanan Akses Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Sektoral Yang Tersedia Up To Date (6 Bulan Terakhir)	%			45%	55%	75%	85%	90%	100%

II.2. Penetapan Kinerja

Sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru terdiri dari indikator kinerja yang wajib dilaksanakan selama kurun waktu 2019.

Dalam rangka mewujudkan cita cita jangka menengah tersebut maka disusunlah Penetapan Kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadikan dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2019. Penetapan Kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut :

PENETAPAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PEKANBARU
TAHUN 2019

NO		URAIAN	Anggaran Tahun 2019
PROG	KEG		
(2.10.) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
01.	**1**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1,897,487,352**
1	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000
2	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129,600,000
3	06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional	178,990,800
4	08.	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	239,787,988
5	09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	21,100,000
6	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	71,879,700
7	11.	Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	74,635,465
8	12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	41,391,000
9	15.	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,640,000
10	17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	164,572,399
11	18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	962,390,000
02.	**2**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**2,111,841,000**
	09.	Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor	2.111,841,000

05.	**3**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur**	**12,472,000**
		03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12,472,000
06.	**4**		**Program PeningkatanPengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**14,958,400**
		01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,981,100
		02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	4,977,500
		04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4,999,800
15.	**5**		**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**4,936,372,580**
		02.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	84,216,000
		03.	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	132.037.680
		08	Pengembangan E-Government Pemerintah Kota Pekanbaru	-
		09	Pengembangan Pekanbaru Smart City	-
		10	Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi	3.251.924.400
		12	Sistim Informasi Layanan Publik	1.095.725.400
		13	Pengembangan Komunikasi Berbasis MultimMedia	372,469,100
16.	**6**		**Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan Komunikasi dan Informasi**	**-**
		01.	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	-
18.	**8**		**Program Kerjasama Informasi dan Media Massa**	**1,150,146,495**
		02.	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	46,688,000
		03.	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	-
		04.	Pengelolaan website www.pekanbaru.go.id	174,852,850
		05.	Pengelolaan Majalah Bertuah	204,321,800
		06.	Pengelolaan PPID	186,996,785
		07.	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	113,320,110
		08	Pembinaan masyarakat Bidang Komunikasi Informasi	423,966,950
19.	**9**		**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah**	**117,617,160**
		01.	Pengembangan Basis Data Informasi Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian	117,617,160

		02.	Pengelolaan Sumber Daya Persandian di Pemerintah	-
(2.14.) - STATISTIK				**297,391,075**
15.	**10**		**Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah**	**297,391,075**
		01.	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	240,743,820
		02.	Pengelolaan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	56,647,255
		03.	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	-
		04.	Pengelolaan, Updating dan Analisis Data PDRB	-
JUMLAH				**10,592,286,062**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan jawaban dan penjelasan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam Renstra SKPD. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan Indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintahan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana ditunangkan dalam dokumen penetapan kinerja Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

NAMA OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra) tahun 2017	Realisasi Target Hasil Program dan Kegiatan dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019		
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi %
1.02.1.02.10.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**						
1.02.1.02.10.01.01 ..01.	*Penyediaan jasa surat menyurat*	Tersedianya materai	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	**100%**	- 650 materai 6000 - 200 materai 3000	- 650 materai 6000 - 200 materai 3000	100%

1.02.1.02.10.01.01..02.	*Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*	Tersedianya jasa komunikasi dan layanan internet	Terwujudnya ketersediaan sarana komunikasi guna menunjang kelancaran administrasi perkantoran	**100%**	1 tahun	1 tahun	100%
1.02.1.02.10.01.01..06.	*Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional*	Jumlah kendaraan yang diservice dan diisi BBM	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	**100%**	6 Unit kendaraan roda 4	4 Unit kendaraan roda 4	100%
1.02.1.02.10.01.01.08	*Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	Terciptanya ruangan kerja yang bersih	Rasio luas kantor yang memenuhi standar kebersihan	**90%**	1 tahun	Jumlah ruangan yang bersih dan aman	100%
1.02.1.02.10.01.01.09.	*Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja*	Terpeliharanya peralatan kerja	Terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	**94%**	1 tahun	- Terjaminnya keamanan asset perkantoran - Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%
1.02.1.02.10.01.01.10.	*Penyediaan Alat Tulis Kantor*	Tersedianya alat tulis kantor	Terwujudnya ketersediaan alat tulis kantor guna menunjang kelancaran pelayananan administrasi perkantoran	**100%**	1 tahun	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%
1.02.1.02.10.01.01.11.	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya ketersediaan barang cetakan dan penggandaan guna menunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	**100%**	1 tahun	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%
1.02.1.02.10.01.01.12.	*Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor*	Tersedianya komponen instalasi listrik/ bangunan kantor	Terwujudnya ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor guna menunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	**100%**	1 tahun	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%
1.02.1.02.10.01.01.15.	*Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan*	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	**100%**	1 tahun	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%
1.02.1.02.10.01.01.17.	*Penyediaan makanan dan minuman*	Tersedianya makanan dan minuman	Terwujudnya ketersediaan makanan dan minuman guna menunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	**100%**	1 tahun	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%
1.02.1.02.10.01.01.18.	*Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah*	Koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat/ daerah lainnya	Terwujudnya sinkronisasi informasi	**100%**	1 tahun	Terwujudnya sinkronisasi informasi dan kegiatan pembangunan	100%

2.10.2.10.01.02.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**						
1.02.1.02.10.01.01.02.09.	*Pengadaan peralatan gedung kantor*	Tersedianya peralatan gedung kantor	Terwujudnya ketersediaan peralatan gedung kantor	**100%**	1 tahun	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%
***1.02.1.02.10.01.*05.**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**						
1.02.1.02.10.01.05.03.	*Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan*	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	**100%**	1 tahun	Meningkatknya kapasitas sumber daya aparatur	80%
***1.02.1.02.10.01.*06.**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**						
1.02.1.02.10.01.06.01.	*Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*	Tersusunnya LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Diketahuinya tingkat capaian kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dna Informatika	**100%**	Tersusunnya LAKIP Diskominfo tahun 2018	1 dokumen	100%
1.02.1.02.10.01.06.02.	*Penyusunan laporan keuangan semesteran*	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	**100%**	Tersedianya laporan keuangan semesteran	1 laporan	100%
1.02.1.02.10.0106.04.	*Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun*	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	**100%**	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	100%
***1.02.1.02.10.01.*15.**	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**						
1.02.1.02.10.01.15.02.	*Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi*	Terlaksananya program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatnya infrastruktur jaringan PDE serta akses bagi pengguna	**100%**	1 tahun	Berkembangnya system komunikasi, informasi dan media massa	85%
1.02.1.02.10.01.15.03.	*Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi*	Terlaksananya program pengembangan sumber daya komunikasi, informasi	Meningkatnya infrastruktur jaringan PDE serta akses bagi pengguna	-	1 kegiatan	Tersedianya system informasi public serta aplikasi Diskominfo yang memadai	90%
1.02.1.02.10.01.15.08.	*Pengembangan E-Government Pemerintah Kota Pekanbaru*	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.10.01.15.10.	*Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi*	Terbinanya Infrastruktur Komunikasi dan Informasi	-	-	1 pekerjaan	Terwujudnya kelengkapan gedung kantor guna menunjang kegiatan pelayanan	100%

1.02.1.02.10.01.15.12.	*System Informasi terhadap Layanan Publik*	Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	-	-	1 pekerjaan	Aplikasi, software system aplikasi, pengembangan system data base	100%
1.02.1.02.10.01.15.13.	*Pengembangan Komunikasi Berbasis Multimedia*	Tersedianya Media Komunikasi Berbasis Multimedia	-	-	1 pekerjaan	Video dokumentasi, layanan oklan edukasi dan video promosi	80%
1.02.1.02.10.01.16.	**Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan Informasi**						
1.02.1.02.10.01.16.01.	*Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi*	Tersedianya koneksi internet pada Diskominfo serta infrastruktur jaringan bagi publik dan aparatur	Tersedianya Sistem Informasi Publik serta Aplikasi Diskominfo yang memadai	**91%**	-	-	-
1.02.1.02.10.01.18.	**Program Kerjasama Informasi dan Media Massa**						
1.02.1.02.10.01.18.02.	*Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah*	CD dan kliping media hasil penerbitan dan penayangan media massa	Terciptanya sinergitas dan kerjasama dengan media massa	**90%**	Tersebarluasnya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terpenuhinya penyebaran luasan informasi penyelenggaran pemerintahan daerah bagi publik	100%
1.02.1.02.10.01.18.03.	*Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat*	Booklet, Leaflet, Majalah, Website dan Terbentuknya PPID Kota Pekanbaru	Tersedianya media informasi tentang profil dan derap pembangunan Kota Pekanbaru, Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota Pekanbaru	**94%**	-	-	-
1.02.1.02.10.01.18.04.	*Pengelolaan Website www.pekanbaru.go.id*	Informasi daerah melalui www.pekanbaru.go.id	Terkelolanya website Pemko Pekanbaru sebagai salah satu media penyebar informasi daerah	-	Terkelolanya informasi daerah melalui Website www.pekanbaru.go.id	Informasi daerah melalui www.pekanbaru.go.id	100%
1.02.1.02.10.01.18.05.	*Pengelolaan Majalah Bertuah*	Media cetak Majalah Bertuah	Terkelolanya Majalah Bertuah Pemko Pekanbaru sebagai salah satu media penyebar informasi daerah	-	Terkelolanyainformasi Kota Pekanbaru melalui Media Cetak (Majalah Bertuah)	Media cetak Majalah Bertuah	100%
1.02.1.02.10.01.18.06.	*Pengelolaan PPID*	Informasi daerah melalui PPID	Terkelolanya PPID sebagai pusat informasi daerah	-	Terbentuknya perangkat PPID yang lengkap	PPID	100%
1.02.1.02.10.01.18.07.	*Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik*	Opini dan Aspirasi Publik yang bersifat membangun	Terkelolanya Opini dan aspirasi publik yang bersifat membangun bagi Pemerintah Kota Pekanbaru	-	Terserapnya opini dan aspirasi publik	Opini dan aspirasi publik	100%

1.02.1.02.10.01.18.07.	*Pembinaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika*	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat Akan Komunikasi dan Informasi	Terwujudnya Kebutuhan Masyarakat Akan Komunikasi dan Informasi	-	Kegiatan	Sosialisasi Kominfo dan pertunjukan rakyat/pameran	70%
1.02.10.1.02.10.01.19.	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah**						
1.02.10.1.02.10.01.19.01.	*Pengembangan Basis Data Informasi Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian*	Terbentuknya basis data informasi yang terjamin keamanannya	Terpenuhinya kebutuhan basis data informasi yang terjamin keamanannya	-	-	-	-
1.02.15.1.02.10.01.15.01	*Pengembangan Sistem Persandian dan Keamanan Informasi*	Terkelolanya Sistem Persandian dan Keamanan Informasi		83%	1 kegiatan	Sosialisasi dan pelatihan, system keamanan data informasi	80%
1.02.14.1.02.10.01.15.	**Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah**						
1.02.14.1.02.10.01.*15.01.*	*Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah*	Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersusunnya data dan statistik daerah dan tersedianya Buku Data Statistik/ Buku Pekanbaru Dalam Angka	100%	1 kegiatan	Meningkatnya layanan informasi dan statistik	80%
1.02.14.1.02.10.01.*15.02.*	*Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah*	Terlaksananya pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Tersedianya Data Statistik Daerah	100%	1 kegiatan	Meningkatnya layanan informasi dan statistik	80%
1.02.14.1.02.10.01.*15.03*	*Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB*	Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Tersusunnya data PDRB	100%	-	-	-
1.02.14.1.02.10.01.*15.04.*	*Pengolahan, updating dan analisis data PDRB*	Terlaksananya pengolahan, updating dan analisis data PDRB	Tersedianya Buku Data PDRB	100%	-	-	-
4.01.2.10.01.21.	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**						
4.01.2.10.01.21.18.	*Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan*	Tersedianya data/ informasi untuk perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya penyususnan perencanaan pembangunan daerah	100%	-	-	-

A. Analisis Kinerja

Setelah diperoleh data hasil pengukuran kinerja maka dilakukan pengukuran tingkat pencapaian sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan metode perbandingan antara neraca tingkat capaian (target) dengan realisasi capaian dari setiap kegiatan untuk mencapai sasaran Hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbarudapat dilihat pada lampiran Tabel pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Ditinjau dari capaian kinerja masing masing sasaran untuk tahun 2019 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru telah dapat melaksanakan tugas utamanya yang menjadi tanggung jawab organisasi, berikut ini uraian pengukuran kinerja, sebagai berikut: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, dilihat dari masing-masing sasaran stategis yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja (*performance results*) untuk masing masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru tahun anggaran 2019 dapat terlaksana dengan baik tapi belum sesuai target (78.43%). Pencapaian target sasaran dijelaskan dalam realisasi capaian rencana strategis sebagai berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Sasaran	Target Tahun (2019)	Realisasi RKT	Renstra (2019)	Target Realisasi Renstra
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Persentase OPD Dengan IKM "Sangat Baik".	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	100%	100%	75%	100%
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada unit kerja	100%	85%	85%	85%
			Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	35%	56%	75%	56%
			Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	35%	56%	45%	56%
		Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai Lakip SKPD	C	B	B	B
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang terintegrasi dan Transparan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	Persentase Aplikasi Yang Terintegrasi Antar Instansi Dan Lembaga Lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru.	Meningkatnya Jumlah Website OPD yang terintegrasi dengan Portal Pekanbaru	35%	61%	45%	70%
			Jumlah advertorial yang diterbitkan melalui kemitraan media cetak dan elektronik	65%	90%	70%	90%
3	Sistem pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Sistem pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya sistem pengamanan informasi Pemerintah Daerah	35%	65%	55%	65%
5	Jumlah data sektoral yang tersedia, up to date (6 bulan terakhir)	Jumlah data sektoral yang tersedia, up to date (6 bulan terakhir)	Jumlah data sektoral yang tersedia, up to date (6 bulan terakhir)	45%	45%	55%	45%

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

No	Indikator Sasaran	Target Tahun (2019)	Realisasi	
			Tahun 2018	Tahun 2019
1	Persentase OPD Dengan IKM "Sangat Baik".	100%	100%	100%
		100%	85%	85%
		35%	56%	75%
		35%	56%	75%
	Nilai Evaluasi AKIP OPD	C	B	B
2	Persentase Aplikasi Yang Terintegrasi Antar Instansi Dan Lembaga Lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru.	35%	61%	70%
		65%	90%	90%
3	Sistem pengamanan informasi Pemerintah Daerah	35%	65%	65%
5	Jumlah data sektoral yang tersedia, up to date (6 bulan terakhir)	45%	45%	45%

C. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

1. Bidang Penyelenggaran e-Government dan Teknologi Informatika

Permasalahan :

1. Kualitas SDM di Bidang Tehnologi Informasi Komunikasi pada masing- masing SKPD belum memadai.
2. Pengembangan Sistem Informasi yang belum keseluruhan terintegrasi.
3. Pengembangan Pelayanan berbasis elektronik secara online yang belum maksimal.

Solusi :

1. SDM merupakan factor yang sangat penting dalam implementasi TIK, bagaimanapun baiknya Tekhnologi Informasi bila tidak didukung oleh SDM yang cukup maka Implementasinya kurang maksimal . Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan langkah – langkah strategi sebagai berikut :
   - Sosialisasi system Informasi dan Tekhnologi Informasi seperti :(Pelatihan ,Buletin, dll)
   - Penguasaan Sistem Informasi dan Tekhnologi Informasi - Pemanfaatan Sistem Informasi dan Tekhnologi Informasi

2. Pengembangan Sistem Informasi yang belum keseluruhan terintegrasi perlu adanya langkah- langkah strategis diantaranya :

a. Mengembangkan Sistem Informasi yang dapat diakses secara interaktif dengan mudah oleh masyarakat. Seperti Sistem Informasi yang berbasis internet (Web Based)

2. Bidang Informasi Komunikasi Publik

Permasalahan

a. Sumber Daya Manusi terbatas dalam hal jumlah dan yang berkompoten
b. Peralatan kerja yang terbatas dan tidak memenuhi standar serta ruang kerja yang tidak kondusif.
c. Terbatasnya / tidak ada anggaran diseminasi informasi dan kerjasama media
d. Belum optimalnya pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat di Kota Pekanbaru karena keterbatasan sumber daya dan anggaran.
e. Belum tersedianya informasi public dari setiap OPD melalui PPID karena OPD masih mengabaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008)
f. lambannya dalam merespon setiap pengaduan masyarakat disebabkan keterbatasan fasilitas yang ada.
g. Perlu meningkatkan kerjasama dengan OPD, Pemerintah Pusat dan Stakeholder yang berkaitan tentang pengelolaan informasi.

Solusi

a. Penambahan Sumber Daya Manusia dan diadakan anggaran untuk bimtek personil
b. Pengadaan alat yang dibutuhkan dan sesuai standard serta pengadaan ruangan yang dibutuhkan.
c. Penambahan anggaran diseminasi informasi dan anggaran kerjasama media.
d. Perlu dilaksanakan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam mengelola arus informasi.
e. OPD diharapkan peduli tentang keterbukaan informasi dengan melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008)
f. Adanya kerjasama antar OPD dalam merespon setiap pengaduan masyarakat dengan meningkatkan fasilitas penunjang dan sarana yang dipergunakan.

g. Perlu komunikasi antar OPD dengan membentuk Tim Pengelola Media Sosial dan Pengaduan, perlu kerjasama dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Kementerian Kominfo dalam hal peningkatan sarana dan sumber daya manusia serta kerjasama dengan media – media yang ada di Kota Pekanbaru.

3. Bidang Statistik dan Persandian

Permasalahan

a. Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM bidang statistik dan persandian.
b. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai.
c. Pelaksanaan sosialisasi yang kurang di bidang statistic dan persandian.
d. Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan up dating data statistik sektoral yang belum optimal.
e. Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian.

Solusi

a. Penambahan sumber daya manusia yang berkualitas
b. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.
c. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang statistic dan persandian.
d. Meningkatkan validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan up dating data statistic sectoral yang optimal.
e. Perlunya peralatan utama untuk mendukung persandian.

III.2. Realisasi Anggaran

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019 Terdiri dari 9 program dan 28 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 10.592.286.062 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO		URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN				
1	2	3	4	5	6
(2.10.01.) - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			10.592.286.062	8.307.883.579	73%
(2.10.) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.897.487.352	1.697.887.371	89,48

	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.500.000	100,00
	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.600.000	122.927.701	94,85
	06.	Penyediaan Jasa Pmeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional	178.990.800	114.129.400	63,76
	08.	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	239.787.988	231.345.988	96,48
	09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	21.100.000	11.500.000	54,50
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	71.879.700	71.005.000	98,78
	11.	Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	74.635.465	72.618.000	97,30
	12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	41.391.000	41.391.000	100,00
	15.	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.640.000	6.480.000	75,00
	17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	164.572.399	93.008.353	56,52
	18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	962.390.000	928.981.929	96,53
02.		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**2.111.841.000**	**1.604.821.000**	**75,99**
	07.	Pengadaan Perelengkapan Gedung Kantor	-	-	-
	09.	Pengdaaan Peralatan Gedung Kantor	2.111.841.000	1.604.821.000	75,99
	10.	Pengdaaan Mebeuler	-	-	-
	42	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	0	0	0%
05.		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur**	**12.472.000**	**12.472.000**	**100,00**
	03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.472.000	12.472.000	100,00
06.		**Program PeningkatanPengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**14.958.400**	**9.861.000**	**65,92**
	01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.981.100	4.941.000	99,19
	02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	4.977.500	4.920.000	98,84
	04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.999.800	0	-
15.		**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**4.936.372.580**	**3.668.921.203**	**74,32**
	02.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	84.216.000	84.216.000	100,00
	03.	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	132.037.680	107.290.000	81,26
	10.	Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi	3.251.924.400	2.336.226.953	71,84
	12.	Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	1.095.725.400	776.922.250	70,90
	13.	Pengembangan Komunikasi Berbasis Multimedia	372.469.100	364.266.000	97,80
16.		**Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan Komunikasi dan Informasi**	**-**	**-**	**-**
	01.	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	-	-	-
18.		**Program Kerjasama Informasi dan Media Massa**	**1.150.146.495**	**1.004.532.250**	**87,34**
	02.	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	46.688.000	46.688.000	100,00
	03.	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	-	-	-
	04.	Pengelolaan Website www.pekanbaru.go.id	174.852.850	168.513.000	96,37
	05.	Pengelolaan Majalah Bertuah	204.321.800	201.542.750	98,64
	06.	Pengelolaan PPID	186.996.785	158.778.000	84,91
	07.	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	113.320.110	106.036.500	93,57
	08.	Pembinaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informasi	423.966.950	322.974.000	76,18

15		**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah**	**171.617.160**	**161.578.850**	**94,15**
	01.	Pengembangan Basis Data	-	-	-
	01.	Pengembangan sistem persandian dan keamanan informasi	171.617.160	161.578.850	94,15
(2.14.) – STATISTIK					
14.		**Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah**	**297.391.075**	**147.809.905**	**49,70**
	01.	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	240.743.820	92.949.225	38,61
	02.	Pengelolaan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	56.647.255	54.860.680	96,85
	03.	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	-	-	-
	04.	Pengelolaan, Updating dan Analisis Data PDRB	-	-	-
JUMLAH			**10.592.286.062**	**8.307.883.579**	**78,43**

Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk itu perlu dilakukan inovasi. Inovasi yang dilakukan adalah untuk mencapai keberhasilan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian,telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:

1. **Command Center, Wujud Pekanbaru Smart City Madani**

   keberadaan Command Center sangat diperlukan oleh Pemko Pekanbaru. Pendirian Command Center atau teknologi berbasis IT oleh Diskominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru merupakan salah satu upaya percepatan terwujudnya Pekanbaru menuju Smart City Madani. "Command Center memiliki banyak fungsi, diantaranya bisa memonitor aktivitas Kota Pekanbaru lebih dekat dan akurat. Karena nantinya Command Center terkoneksi dengan CCTV yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Pekanbaru,"





2. Kartu Smart Madani

Dalam rangka mendukung terciptanya Pekanbaru sebagai kota “Smart City” yang madani bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru memperkenalkan Kartu Pekanbaru Smart Madani. Kartu ini diperuntukkan bagi warga Pekanbaru dengan berbagai fungsi yang tertanam, mulai dari tabungan, tapcash, e-wallet hingga kartu identitas.

Dalam satu kartu combo Pekanbaru Smart Madani ini terkandung multifungsi yang memudahkan transaksi perbankan bagi pemegangnya. Kartu ini memiliki fungsi kartu debit/ saving, prepaid/ tapcash dan e- wallet untuk kebutuhan bantuan sosial. Kartu debit/ saving, dapat digunakan sebagai alat transaksi di merchant-merchant (baik dalam negeri maupun luar negeri) dan sebagai kartu ATM yang dapat digunakan di seluruh ATM BNI di Indonesia maupun luar negeri serta digunakan untuk sarana pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi pasar dan pajak lainnya.

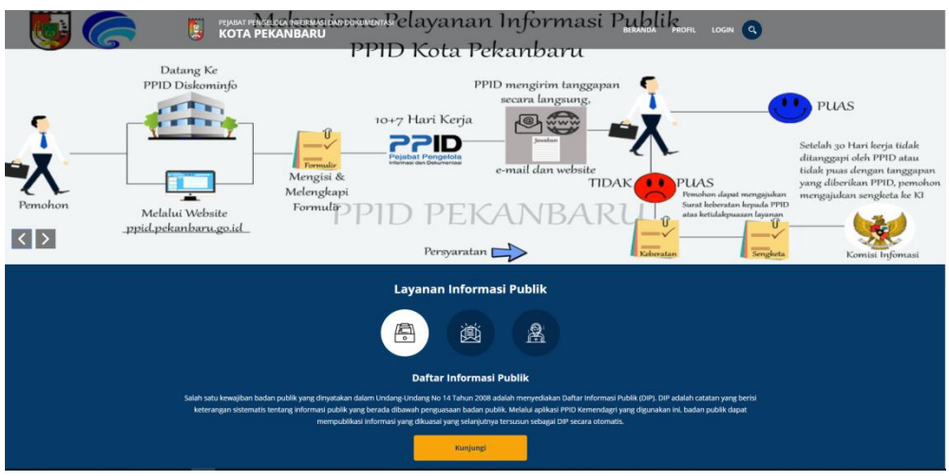


3. **Bank Data**

Aplikasi bank data ini berguna untuk memudahkan dalam menyimpan data dan mentransfer data sehingga mudah di akses dimana saja dan kapan saja. Bank data ini merupakan inovasihasil inovasi dari Diskominfo statistik dan persandian Kota Pekanbaru dalam mendukung Pekanbaru smart cityhttp://bankdata.pekanbaru.go.id/

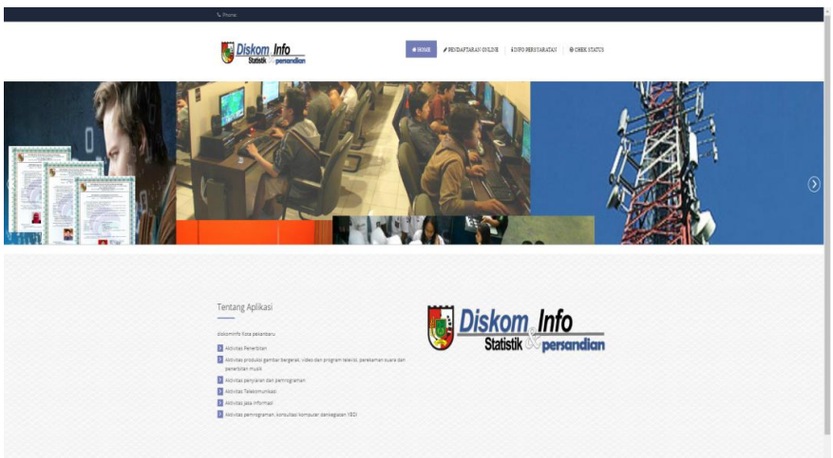


4. **PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi)**



PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana **PPID** berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

E Rekomendasi



aplikasi ini adalah dari semangat seluruh jajaran Kominfo Pekanbaru untuk memberikan layanan yang lebih mudah, cepat dan efisien kepada masyarakat.Awalnya kami melihat banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan rekomendasi di Kominfo, mereka harus bolak balik ke kantor untuk melengkapi berkas. Bahkan meninggalkan aktifitas harian untuk mengurus izin. Untuk itu kami berusaha bagaimana masyarakat mudah mendapatkan rekomendasi dalam perizinan dan hadirlah Aplikasi ini.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru berdasarkan tolak ukur perencanaan strategis dan sistem akuntabilitas yang memadai.

LKjIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujutnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi kepada publik. Oleh karena itu, LKjIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru ini diharapkan akan menumbuhkan saran-saran dan kritik-kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan eksisistensi ekternal Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru.

Sebagai satu-satunya instansi yang menangani infrastruktur TIK di Pemerintahan Kota Pekanbaru, baik pemasangan infrastruktur TIK, maupun perawatan (*maintenance*) serta bidang komunikasi Statistik dan Persandian lainnya maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru harus selalu menjaga kualitas kinerja, kerana hal tersebut akan terkait langsung dengan kualitas Infrastruktur TIK di pemerintahan Kota Pekanbaru. Dengan diterbitkannya LKjIP ini semestinya menjadi landasan fundamental bagi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru untuk selalu konsisten dan berkelanjutan meningkatkan kualitas kinerjanya, sehingga dapat menghasilkan infratruktur TIK yang berkualitas, serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian LKjIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Tahun 2019 ini dibuat dan diharapkan akan menumbuhkan saran-saran dan kritik-kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan eksistensi eksternal Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru.

Akhirnya LKjIP ini disertai dengan harapan semoga akan menjadi landasan fundamental bagi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru untuk selalu meningkatkan kinerjanya dalam tahun-tahun mendatang.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Statistik dan Persandian

FIRMANSYAH EKA PUTRA, ST, MT
Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19720131 200605 1 001